



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

NOTA KEUANGAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**



TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

**NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.

Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hadirin
dan Sidang Dewan yang saya hormati.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan
Yang Maha Esa, atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga pada
kesempatan ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat dan
sejahtera dalam suasana yang penuh kehangatan kekeluargaan.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal
64 ayat 2 bahwa dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk tahun Anggaran tertentu, ditetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu dengan rasa bahagia yang dalam, hari ini saya
dapat melaksanakan salah satu kewajiban selaku Kepala Daerah,
yaitu menyampaikan Nota Keuangan kepada Dewan yang terhormat
untuk mengantarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 1998/1999 yang merupakan tahun terakhir
pelaksanaan Repelita VI.

Menyertai Nota Keuangan yang akan saya sampaikan ini, telah saya sampaikan pula bahan kelengkapan untuk mempermudah pembahasannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah beserta kelengkapan dalam bentuk buku-buku dan lampiran-lampiran dengan Surat Bupati Kepala Daerah tanggal 28 Pebruari 1998, Nomor : 903/27/410.032/1998, dan tanggal 14 Maret 1998, Nomor : 903/246/410.032/1998.

Sudah barang tentu dengan tekad kita semua untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara khususnya masyarakat di Kabupaten Lamongan ini, saya yakin dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dapat berjalan lancar sebagaimana harapan kita semua, sehingga Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD yang akan kita sahkan nanti akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya disertai rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1998/1999 yang saya sampaikan ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. LANDASAN DAN KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
- III. SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN.
- IV. SUSUNAN ANGGARAN BELANJA RUTIN.
- V. SUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN.
- VI. KESIMPULAN.
- VII. PENUTUP.

Untuk itu ijinkanlah saya menyampaikan Nota Keuangan yang merupakan uraian secara garis besar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama, tahun 1997 yang baru kita lewati adalah tahun yang penuh keprihatinan bagi bangsa kita, disamping disebabkan karena banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang melanda di darat, laut dan udara, kita juga mengalami musim kering yang panjang sehingga mengakibatkan menurunnya produktivitas tanaman, khususnya tanaman pangan dan perkebunan.

Pukulan yang lebih berat lagi adalah datangnya gelombang gejolak moneter sejak pertengahan tahun yang lalu.

Krisis keuangan yang melanda dewasa ini ternyata lebih dalam dan lebih panjang dari pada perkiraan semula dilihat dari segi fundamental ekonomi kita dan depresiasi mata uang-mata uang negara di sekitar kita.

Dapat dimaklumi, dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar di bidang moneter tadi, dalam kurun waktu yang relatif singkat pada akhir-akhir ini, Pemerintah telah melakukan revisi terhadap R.APBN tahun 1998/1999. Revisi R.APBN dilakukan dengan merubah parameter-parameter yang sangat mendasar, yaitu kurs Rupiah terhadap Dollar menjadi Rp. 5.000,- per Dollar US, pertumbuhan 0% dan laju inflasi 20%.

Sangat disadari bahwa implikasi dari perubahan parameter-parameter tersebut telah dan akan menimbulkan berbagai dampak yang terjadi di masyarakat diantaranya ;

- a. Meningkatnya jumlah angka pengangguran yang sangat tinggi.
- b. Kondisi perekonomian rakyat yang sulit dan memprihatinkan.
- c. Menurunnya daya beli masyarakat.
- d. Munculnya kerawanan-kerawanan sosial dalam masyarakat.

Gejala yang telah langsung dapat dirasakan bersama di tengah-tengah kita saat ini, diantaranya adalah kelangkaan dan naiknya harga "Sembilan Bahan Pokok" yang ada di masyarakat serta beberapa tindakan-tindakan destruktif yang terjadi di beberapa daerah.

Namun demikian tak kurang pula, tindakan-tindakan positif yang muncul secara sporadis berupa Gerakan Cinta Rupiah, Gerakan Cinta Tanah Air dan Gerakan-gerakan Sosial yang timbul atas dasar Kesetiakawanan Sosial.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam situasi yang demikian, kita senantiasa harus tetap memahami sebab dan akibat yang merupakan mata rantai timbulnya "badai" yang melanda bangsa kita ini;

- a. Bahwa Krisis yang terjadi sebagaimana sekarang ini juga merupakan krisis yang terjadi di berbagai negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya.
- b. Globalisasi yang melanda lebih cepat dari perhitungan mengakibatkan terkesan semua terkena "pendadakan" sehingga seakan terkesima dan bereaksi positif maupun negatif.
- c. Bagi bangsa Indonesia hal ini merupakan tantangan yang cukup berat, disebabkan oleh ;
 - Kondisi dasar Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial.
 - Bahwa kita sekarang ini sedang dalam pertengahan proses pemantapan pembangunan yang intensif ;

Dalam kerangka tahapan pembangunan (1969-2019), posisi kita sekarang dalam tahun 1997/1998 yang artinya dalam posisi pertengahan jalan untuk proses pembangunan tersebut.

- Kesenjangan pemahaman tentang masalah internal yakni proses pembangunan dan masalah eksternal berupa Globalisasi.

Kita percaya bahwa dengan berbagai langkah-langkah mendasar yang telah dilakukan Pemerintah melalui program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang mencakup bidang yang luas, serta dukungan berbagai lembaga internasional mudah-mudahan akan secepatnya dapat memulihkan kepercayaan pelaku-pelaku ekonomi di negeri sendiri maupun di luar negeri.

Dalam hal demikian kita senantiasa tetap bertekad untuk menghadapi masalah ini, khususnya dalam mengeliminir implikasi-implikasi yang terjadi sebagaimana yang saya kemukakan tadi, kita perlu menciptakan berbagai upaya sekaligus dalam rangka melakukan langkah mengantisipasi ke depan agar tidak terjadi situasi dan kondisi yang lebih rawan, khususnya implikasi negatif di bidang sosial dan politik dengan tanpa mengurangi pencapaian sasaran dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Disamping berbagai tantangan yang menghadang di depan, kita juga tidak boleh kehilangan peluang yang ada, yakni Produk Dalam Negeri akan menjadi andalan yang lebih baik, dan peluang ekspor akan lebih menguntungkan. Hal ini apabila dikelola dengan serius dan tepat, akan menjadi kebangkitan ekonomi masyarakat yang berketahanan tinggi.

Unsur penting yang harus kita perhatikan adalah penguatan basis perekonomian masyarakat. Dengan bertumpu pada kondisi sumber daya alam yang ada maka kekuatan kita berada pada 8 basis kekuatan ekonomi masyarakat yang semuanya

cenderung berada di desa, yakni pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, kerajinan, seni budaya, pariwisata, tenaga kerja dan pertambangan.

Delapan basis kekuatan tersebut akan kita intensifkan dan diselaraskan dengan berbagai program yang ada antara lain Gerakan Kembali ke Desa.

Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,

Dalam mendukung 8 basis kekuatan ekonomi yang saya kemukakan tadi berbagai program kita laksanakan dengan menjabarkan berbagai kegiatan pokok dalam program dan proyek dalam Rancangan APBD ini, yang diantaranya adalah :

- a. Mengoptimalisasi penggunaan lahan dan pendapatan petani.
- b. Pengadaan bibit dalam rangka intensifikasi pada pekarangan maupun galengan/pematang sawah.
- c. Peningkatan manajemen dan pengelolaan irigasi.
- d. Menghidupkan kembali lumbung desa dalam rangka ketahanan pangan.
- e. Penyediaan pangan protein ikan.
- f. Meningkatkan populasi ternak dan penyediaan pakan ternak yang bermutu.
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengrajin serta pendapatannya.
- h. Pemasyarakatan bahan bakar alternatif batu bara.
- i. Peningkatan kemampuan usaha informal di pedesaan dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

Disamping itu dilakukan pula berbagai langkah dan upaya untuk mengeliminir implikasi-implikasi yang terjadi sebagaimana yang saya kemukakan tadi, antara lain :

a. Membentuk Tim Pemantau Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dengan Surat Keputusan Bupati KDH tanggal 9 Pebruari 1998 Nomor : 188/22/SK/410.013/98 yang ditugasi untuk memantau keadaan dan situasi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat terjadinya krisis moneter di Kabupaten Lamongan ini.

Walaupun di beberapa daerah tetangga terjadi adanya gejala, *alhamdulillah* di Kabupaten Lamongan tampak cukup tenang dan terkendali. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni ;

- Mengadakan penerangan dan penyuluhan tentang bagaimana menyikapi krisis moneter kepada seluruh jajaran pimpinan dinas/Instansi hingga tingkat bawah, para pengusaha kecil maupun menengah, Pimpinan Organisasi sosial politik maupun Ormas dengan melibatkan unsur-unsur tokoh-tokoh ulama dan masyarakat.
- Mengadakan gerakan sosial di daerah-daerah yang rawan pangan dan menyalurkan berbagai bantuan yang telah diterima kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa disampaikan terima kasih kepada Badan-badan Sosial terutama pada Pimpinan Para Grup dan Bank Mega, jajaran Kodam V Brawijaya serta Kasad yang telah memberi bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan berupa paket Sembako yang terkumpul sejumlah 2.500 paket dan 7.500 Ton beras.
- Mengadakan operasi pasar dan menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat yang hingga saat ini telah tersalur 450 Ton Beras, 40 Ton Gula Pasir dan tepung terigu 10 ton.
- Hingga tanggal 7 Maret 1998, keadaan stok bahan pangan di Gudang Dolog Lamongan masih cukup besar, yaitu sebanyak 1.000 ton beras, namun apabila keadaan

memaksa akan dikoordinasikan dan mengambil di Gudang Dolog Tuban dan Kalitidu Bojonegoro.

- b. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan masyarakat kecil terutama keluarga prasejahtera, oleh Pemerintah juga dicanangkan adanya program baru berupa Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU). Program ini merupakan suatu fasilitas kredit terpadu yang disediakan oleh Pemerintah untuk membantu para pengusaha kecil atau Koperasi dan para Keluarga yang tergabung dalam kelompok Program Keluarga Sejahtera (Prokesra) untuk menyumbangkan usahanya melalui Pola Kemitraan Usaha. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk mendapatkan fasilitas Kredit baru dengan suku bunga yang lebih rendah dan untuk menumbuhkan semangat kemitraan usaha.

Program ini mengena karena bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pengusaha kecil atau Koperasi dan keluarga sejahtera dalam rangka mengembangkan jaringan ekonomi yang kuat di pedesaan dan sangat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Kredit ini dipersiapkan untuk tiap Kabupaten sebesar 2 Milyar Rupiah dengan pemberian kredit maksimum sebesar 50 Juta Rupiah perkelompok dan maksimum kredit per anggota kelompok sebesar 2 Juta Rupiah, jangka waktu 1 (satu) tahun. Sementara ini yang telah mengajukan kredit sebanyak 16 (enambelas) Pengusaha Kecil/ Koperasi dan 38 (tiga puluh delapan) kelompok Prokesra dengan jumlah kredit 955 Juta 500 Ribu Rupiah

Saat ini masih dalam proses pengajuan karena kelompok Prokesra yang mengajukan kredit itu disamping memenuhi persyaratan administratif, juga harus memperoleh Sertifikat Kelayakan Usaha (SKU).

c. Padat Karya Tahap I.

Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dengan terjadinya kekeringan yang berkepanjangan dan adanya gejolak Moneter pada beberapa bulan yang lalu telah menimbulkan dampak negatif yang memerlukan penanganan segera.

Kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan menurunnya produksi komoditi pertanian khususnya tanaman pangan dan mengakibatkan rawan pangan dan menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Sementara itu adanya gejolak moneter telah menimbulkan masalah keuangan, baik bagi Pemerintah maupun swasta. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan pada usaha-usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi serta sektor industri terutama industri yang kandungan impornya tinggi.

Sebagai akibat dari keadaan ini telah terjadi peningkatan pengangguran yang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan namun juga di pedesaan terutama daerah desa pemasok tenaga kerja ke perkotaan.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut maka Pemerintah telah melakukan penanggulangan dengan program mendesak (*crash program*) 1997/1998 yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d akhir Maret 1998 ini.

Dengan demikian maka tujuan dari proyek penanggulangan dampak kekeringan dengan masalah ketenagakerjaan ini adalah :

1. Menyediakan lapangan kerja produktif untuk mengatasi meningkatnya pengangguran, dan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah di pedesaan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari proyek ini adalah berkurangnya tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya yang terkena bencana kekeringan dan gejolak moneter.

Dari usulan kami ke Pemerintah Pusat, pada tahun anggaran 1997/1998 ini kita memperoleh alokasi dana untuk 11 Kecamatan dengan nilai proyek sebesar 910 Juta 881 Ribu Rupiah yang diperuntukkan upah kerja sebesar 810 Juta Rupiah, pengadaan bahan-bahan dan alat-alat sebesar 90 Juta Rupiah dan biaya umum sebesar 10 Juta 881 Ribu Rupiah.

Biaya sebesar tersebut diatas direncanakan untuk jumlah tenaga kerja sebanyak 108.000 tenaga kerja, dengan sistem pengupahan dilaksanakan atas dasar Hari Orang Kerja (HOK) dengan jam kerja efektif lima jam dengan upah kerja sebesar 7 Ribu 500 Rupiah per HOK.

Adapun lokasinya tersebar di Kecamatan Lamongan, Turi, Tikung, Mantup, Sekaran, Babat, Karangbinangun, Kalitengah, Solokuro, Laren, dan Karanggeneng, meliputi kegiatan antara lain :

- Perbaiki jalan lingkungan desa;
- Perbaiki saluran irigasi;
- Perbaiki saluran drainase;
- dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

Hingga saat ini keadaan fisik telah mencapai 85% dan menyerap dana 81,15% (s/d 28 Pebruari 1998).

Selanjutnya untuk padat karya tahap II oleh Pemerintah Pusat di alokasikan dengan dana sebesar 300 Juta Rupiah tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Lamongan, Turi, Sekaran, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun, dengan sasaran kegiatan selain untuk penanggulangan dampak kekeringan dan krisis moneter, lebih di arahkan kepada bantuan penanggulangan bencana alam.

Berdasarkan hasil pemantauan di daerah-daerah ternyata kegiatan padat karya ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat dan benar-benar dapat dirasakan hasilnya.

II. LANDASAN DAN KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1998/1999.

A. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1998/1999 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan REPELITA VI Jawa Timur ;
11. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan REPELITA VI Kabupaten Lamongan ;
12. Amanat Presiden Republik Indonesia pada penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 pada tanggal 6 Januari 1998 ;
13. Saran dan usul Dewan Yang Terhormat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B. KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN

Dalam rangka mengatasi pengaruh gejolak moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan masyarakat serta kemungkinan pengaruhnya terhadap pelaksanaan anggaran Daerah, beberapa pendekatan strategis yang diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan efisiensi dan efektivitas di semua Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya yang diberi kewenangan mengelola anggaran, sehingga Daerah dapat memaksimalkan manfaat dari keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia.

- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang berkaitan erat dengan peningkatan profesionalisme aparatur yang berarti memiliki tingkat keahlian dan ketrampilan yang memadai pada bidang tugasnya, memiliki etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi, untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.
- c. Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja secara berkesinambungan yang berkaitan dengan tata laksana pekerjaan dan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
Semua rumusan dan masukan bagi produk-produk peraturan yang dibutuhkan diarahkan pada bentuk-bentuk regulasi yang bermuara pada pemberdayaan Daerah Otonom. Sehingga dengan demikian dapat diciptakan iklim yang kondusif dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan investasi.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan dengan instansi vertikal di daerah.

III. SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

Dalam tahun 1998/1999 yang didukung oleh 4 (empat) Bagian Penerimaan, Jumlah Anggaran Pendapatan tanpa Urusan Kas dan Perhitungan direncanakan sebesar *80 Milyar 740 Juta 278 Ribu 598 Rupiah* yang berarti ada kenaikan sebesar *30 Milyar 192 Juta 984 Ribu 734 Rupiah* atau naik *59,73%* dari rencana tahun 1997/1998 sebesar *50 Milyar 547 Juta 293 Ribu 864 Rupiah*. Dari jumlah penerimaan tersebut masing-masing dapat saya uraikan sebagai berikut :

1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU :

Dalam tahun 1998/1999 Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu direncanakan sebesar *251 Juta 500 Ribu Rupiah*, penganggaran Sisa Lebih tersebut adalah bersifat sementara, secara riil akan disesuaikan dalam Perubahan APBD yang akan datang setelah diadakan Perhitungan APBD tahun 1997/1998.

Adapun penganggaran Sisa Lebih tersebut diperkirakan karena adanya penghematan Belanja Rutin dan sisa konstruksi proyek serta kelebihan dari target PAD dan PBB.

2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

Dalam tahun anggaran 1998/1999 direncanakan sebesar *5 Milyar 247 Juta 650 Ribu Rupiah* naik sebesar *264 Juta 700 Ribu Rupiah* atau naik 5,31% dari rencana tahun 1997/1998.

Terhadap penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, tetap diupayakan peningkatan penerimaannya. Penetapan target PAD telah dihitung berdasarkan potensi riil yang akan diterima dan akan terus diupayakan pencapaiannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan, dan telah memperhatikan pula kondisi perekonomian masyarakat yang kurang menggembirakan saat ini.

Beberapa kenaikan target dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menonjol diantaranya adalah ;

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1). Pajak Penerangan Jalan naik | Rp. 100.000.000,00 |
| 2). Retribusi Uang Pangkalan naik | Rp. 25.000.000,00 |
| 3). Retribusi Pasar naik | Rp. 15.000.000,00 |
| 4). Retribusi Kebersihan naik | Rp. 48.000.000,00 |
| 5). Rumah Sakit dan Puskesmas naik | Rp. 110.000.000,00 |
- Perlu disampaikan bahwa kenaikan Retribusi Rumah Sakit dan Balai Pengobatan sebesar Rp.110.000.000,00 terbesar adalah dari Retribusi Puskesmas yang naik sebesar Rp.100.000.000,00.

Penetapan target tersebut akan dikembalikan lagi untuk Biaya Operasional Puskesmas yang semula 25%, dalam tahun ini direncanakan sebesar 50%, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 66 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Disamping kenaikan-kenaikan tadi, terdapat pula penurunan terhadap beberapa ayat Pajak maupun Retribusi Daerah, diantaranya ialah ;

- 1).Pajak Pertunjukan turun Rp. 20.000.000,00 ✓
- 2).Retribusi Uang Leges turun Rp. 12.500.000,00 ✓
- 3).Retribusi Uang Sempadan/IMB turun Rp. 40.000.000,00 ✓
- 4).Retribusi Tempat Rekreasi turun Rp. 28.000.000,00
- 5).Retribusi SITU turun Rp. 15.000.000,00 ✓

Penurunan tersebut dengan perkiraan bahwa potensi obyek pajak maupun retribusi yang akan dipungut telah mengalami kejenuhan, sehingga dalam tahun ini penetapan targetnya diturunkan.

3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK :

Dalam tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *7 Milyar 219 Juta 145 Ribu 498 Rupiah* sehingga terdapat kenaikan sebesar *646 Juta 634 Ribu 334 Rupiah*.

Kenaikan pada Bagian Hasil Pajak/Bukan Pajak selain kenaikan pada Pajak Bumi Bangunan sebesar *307 Juta Rupiah* juga karena kenaikan Bagian Pajak Kendaraan Bermotor sebesar *350 Juta 881 Ribu 450 Rupiah*.

Sedangkan pada Pos Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat penurunan sebesar *10 Juta 747 Ribu 116 Rupiah* dari rencana tahun 1997/ 1998.

4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN :

Dalam tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *68 Milyar 21 Juta 983 Ribu 100 Rupiah* naik *31 Milyar 834 Juta 854 Ribu 400 Rupiah* dari rencana tahun 1997/1998.

Kenaikan tersebut sebagian berasal dari kenaikan Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara sebesar *30 Milyar 236 Juta 477 Ribu 400 Rupiah* utamanya digunakan untuk pembayaran gaji guru SDN yang semula dibayar lewat Tingkat I Jawa Timur, mulai tahun 1998/1999 pembayarannya melalui APBD Tingkat II Lamongan.

Sedangkan pada sisi Bantuan kenaikan yang menonjol yaitu pada Penerimaan bantuan/sumbangan khusus yang dipergunakan untuk Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

IV. BELANJA RUTIN :

Pengeluaran Rutin dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil setiap Dinas/Lembaga/Kantor dengan prioritas diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Belanja rutin tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *54 Milyar 210 Juta 938 Ribu 598 Rupiah* naik *30 Milyar 962 Juta 684 Ribu 734 Rupiah* dari rencana tahun 1997/1998.

Kenaikan Belanja Rutin tersebut memang akan terlihat besar, manakala dihitung dengan kenaikan persentase sebesar 133,18% dari rencana tahun 1997/1998, namun demikian apabila kita amati pada per komponen belanja akan nampak bahwa sebagian besar adalah kenaikan Belanja Pegawai yang naik sebesar: *30 Milyar 310 Juta 519 Ribu 400 Rupiah*.

Kenaikan itu disebabkan bahwa mulai tahun 1998/1999 pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom khususnya Gaji Guru Sekolah Dasar Negeri diserahkan sepenuhnya kepada Daerah Tingkat II, sehingga tidak dianggarkan lagi pada APBD Tingkat I Jawa Timur.

Kenaikan pengeluaran rutin lainnya adalah kenaikan Belanja Barang yang direncanakan naik *136 Juta 400 Ribu 500 Rupiah*, kenaikan ini adalah untuk kenaikan Ongkos Kantor sebagai penyesuaian terhadap naiknya harga beberapa alat kebutuhan kantor, disamping bantuan untuk membiayai pembekalan Camat selaku Kepala Wilayah dan wakil pemerintah Pusat di Daerah serta unsur terkait lainnya guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan dibidang teknis administrasi Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih aktif berperan dalam meningkatkan penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Desember 1997 Nomor : 973/3604/SJ.

Selain kenaikan tadi, juga ada kenaikan lain yang tampak menonjol yakni kenaikan belanja lain-lain sebesar *341 Juta 892 Ribu Rupiah*, yang merupakan kenaikan upah pungut/insentif karena naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), biaya operasional Puskesmas-puskesmas, biaya operasional Pembantu Bupati serta biaya operasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum Daerah.

Khusus mengenai Belanja DPRD secara keseluruhan memang nampak ada penurunan, disebabkan pada tahun 1997/1998 ada beberapa anggaran DPRD yang dihitung selama 13 bulan.

Namun demikian untuk tahun anggaran 1998/1999 direncanakan ada tambahan berupa biaya untuk general *chek up*, pakaian dinas dan kenaikan dana penunjang karena naiknya Pendapatan Asli daerah (PAD), serta secara bertahap dilengkapinya prasarana untuk perumahan dan mess DPRD yang dianggarkan dalam Belanja Pembangunan.

V. BELANJA PEMBANGUNAN :

Dengan penerimaan daerah dan pengeluaran belanja rutin seperti saya uraikan tadi maka Belanja Pembangunan yang tersedia adalah *26 Milyar 529 Juta 340 Ribu Rupiah*, turun *769 Juta 700 Ribu Rupiah* atau 2,82% dari rencana tahun 1997/1998.

Dibalik penurunan itu ada beberapa sebab yang patut kita perhatikan, yakni ;

- a. Dana Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan (SDB), yang dalam tahun 1997/1998 mendapat plafond sebesar *782 Juta Rupiah*, dalam tahun 1998/1999 masih kita catat U.P karena belum diperolehnya plafond untuk Subsidi tersebut.
- b. Dalam tahun 1997/1998 menampung dana Bantuan Luar Negeri pendamping Inpres Peningkatan Jalan dan Dana Pinjaman SLAP yang dalam tahun 1998/1999 tidak kita anggarkan.

Namun demikian dalam tahun 1998/1999, program pembangunan tetap diprioritaskan dan dilanjutkan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Belanja Pembangunan yang secara langsung diarahkan untuk mendukung basis perekonomian rakyat dianggarkan sebesar *2 Milyar 325 Juta 170 Ribu Rupiah* atau 22,50 % dari Belanja Pembangunan yang bersumber dari APBD II dan Inpres Dati II. Angka ini merupakan pelaksanaan dari sikap konsisten kita untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan, kegiatan itu sekaligus dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh negatif gejolak moneter sekarang ini. Di lain pihak untuk memelihara momentum pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya saya akan menjelaskan Anggaran Belanja Pembangunan yang mencakup sektor-sektor pembangunan.

1. Sektor Industri, dianggarkan sebesar *46 Juta 500 Ribu Rupiah*, prioritasnya adalah pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat.
2. Sektor pertanian dan kehutanan anggarannya mencapai sebesar *904 Juta 300 Ribu Rupiah*, prioritasnya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian.
 Dalam sektor ini dianggarkan pula proyek gerakan pemanfaatan lumbung desa, dikandung maksud untuk menghidupkan dan menggairahkan kembali kegiatan lumbung desa dalam rangka ketahanan pangan di pedesaan.
3. Sektor sumber daya air dan irigasi akan memperoleh anggaran sebesar *132 Juta Rupiah*, kegiatannya adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui IPAIR.
4. Sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi, dianggarkan sebesar *1 Milyar 267 Juta 670 Ribu Rupiah*.
 Kegiatannya antara lain untuk pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, pendataan obyek dan subyek PBB agar diperoleh data obyek dan subyek PBB yang representatif agar penerimaan PBB dapat ditingkatkan lagi serta pembinaan dan pengembangan koperasi utamanya untuk mendorong koperasi agar mampu mengembangkan usaha di beberapa sektor perekonomian masyarakat.

5. Sektor transportasi, sektor ini memperoleh anggaran sebesar *4 Milyar 354 Juta 677 Ribu Rupiah*. Sektor ini memperoleh anggaran terbesar kedua setelah sektor pembangunan daerah. Sebagian besar anggarannya untuk pembangunan prasarana jalan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.
6. Sektor pertambangan dan energi, anggaran yang tersedia sebesar *60 Juta Rupiah*. Kegiatannya adalah untuk melanjutkan pemasangan lampu-lampu penerangan jalan umum di Ibukota-ibukota Kecamatan.
7. Sektor Pariwisata dan telekomunikasi daerah, anggarannya sebesar *160 Juta Rupiah*. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan dan pengembangan obyek wisata di Waduk Gondang sebagai upaya untuk terus meningkatkan pembangunan kepariwisataan daerah menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga pada gilirannya pendapatan masyarakat dan daerah akan dapat semakin meningkat.
8. Sektor pembangunan daerah dan pemukiman dengan anggaran sebesar *9 Milyar 788 Juta 628 Ribu Rupiah*. Jumlah ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan anggaran untuk sektor lainnya. Sebagian besar dari sektor ini dipergunakan untuk sub sektor pembangunan desa yang mendapat alokasi sebesar *8 Milyar 912 Juta 500 Ribu Rupiah* disamping untuk sub sektor pembangunan kota sebesar *876 Juta 128 Ribu Rupiah*. Pada sub sektor pembangunan desa kegiatan yang penting adalah proyek bantuan pembangunan desa yang berasal dari Inpres Desa, proyek pembangunan prasarana desa tertinggal (P3DT) serta Program Pengembangan

Kecamatan dan proyek prasarana pedesaan (Ronggohadi) yang dilaksanakan dengan sistem padat karya.

9. Sektor Lingkungan hidup dan tata ruang dengan anggaran *536 Juta 400 Ribu Rupiah*.
Kegiatannya yang penting adalah untuk program penyelamatan hutan, tanah dan air serta peningkatan kemampuan, pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan.
10. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga.
Anggarannya sebesar 3 Milyar 304 Juta 572 Ribu Rupiah, merupakan terbesar ketiga dari seluruh belanja pembangunan.
Sebagian besar kegiatannya adalah untuk menunjang program pendidikan dasar yang berasal dari dana bantuan Inpres pembangunan SD serta Inpres Dati II khusus, disamping untuk program pembinaan pemuda dan olahraga.
11. Sektor kependudukan dan keluarga berencana dengan anggaran sebesar *390 Juta 153 Ribu Rupiah*, kegiatannya untuk program kependudukan berupa proyek Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).
12. Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja.
Anggarannya sebesar 1 Milyar 381 Juta 100 Ribu Rupiah, dari segi anggaran sektor ini termasuk sektor yang mendapat alokasi diatas 1 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan masyarakat dan berbagai kegiatan sosial tetap mendapat perhatian besar.
Didalam sektor ini sebagian besar berasal dari bantuan Inpres Kesehatan dan Inpres Dati II Khusus disamping ditunjang dari dana lainnya.

13. Sektor Perumahan dan pemukiman, dianggarkan sebesar *1 Milyar 495 Juta 180 Ribu Rupiah*.

Dari segi anggaran, sektor ini menempati kelima terbesar. Diantara kegiatan yang ada adalah untuk perbaikan/pemugaran perumahan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta untuk Program penyehatan lingkungan pemukiman yang merupakan kegiatan terbesar dalam sektor ini yang dananya berasal dari APBN dan Bantuan Luar Negeri dengan prioritas untuk penanganan banjir di perkotaan.

14. Sektor Agama memperoleh anggaran sebesar *47 Juta 500 Ribu Rupiah*, kegiatan pokoknya adalah untuk pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah.

15. Sektor Ilmu pengetahuan dan pemukiman, dianggarkan sebesar *125 Juta Rupiah*, kegiatannya adalah untuk menunjang program penelitian pendukung perencanaan pembangunan.

16. Sektor Hukum, anggarannya sebesar *18 Juta Rupiah* yang akan digunakan untuk program penyuluhan hukum kepada masyarakat.

17. Sektor Aparatur Pemerintah dan pengawasan, anggarannya sebesar *2 Milyar 447 Juta 660 Ribu Rupiah*.

Kegiatan utamanya adalah untuk program peningkatan prasarana dan sarana aparatur pemerintah termasuk didalamnya Proyek pembangunan Mess DPRD, pembangunan Kantor Bappeda, pembangunan gedung KORPRI serta bantuan biaya untuk pemilihan Kepala Desa.

Disamping itu juga berupa program pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

18. Sektor politik, penerangan, komunikasi dan media masa dianggarkan sebesar *60 Juta Rupiah*, kegiatannya untuk program pembinaan politik di daerah serta program pembinaan dan pengembangan pers di daerah.
19. Sektor Keamanan dan ketertiban umum, anggarannya sebesar *10 Juta Rupiah* yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kemampuan Hansip/Wankamra.

Saudara Pimpinan dan Sidang dewan yang terhormat,

Selanjutnya mengenai Urusan Kas dan Perhitungan dalam tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *10 Milyar 361 Juta 888 Ribu 164 Rupiah* sehingga seluruh volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1998/1999 termasuk Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar *91 Milyar 102 Juta 166 Ribu 762 Rupiah* terdapat kenaikan sebesar *11 Milyar 264 Juta 689 Ribu 998 Rupiah* dari tahun 1997/1998 sebesar *79 Milyar 837 Juta 476 Ribu 764 Rupiah*.

VI. KESIMPULAN

Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999 baik meliputi pendapatan maupun belanja yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999 tanpa Urusan Kas dan Perhitungan direncanakan sebesar *80 Milyar 740 Juta 278 Ribu 598 Rupiah* sehingga ada kenaikan sebesar *30 Milyar 192 Juta 984 Ribu 734 Rupiah* atau naik 59,73% dari volume tahun 1997/1998 sebesar *50 Milyar 547 Juta 293 Ribu 864 Rupiah*.

2. Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *5 Milyar 247 Juta 650 Ribu Rupiah* naik sebesar *264 Juta 700 Ribu Rupiah* atau naik 5,31% dari rencana tahun 1997/1998 sebesar *4 Milyar 982 Juta 950 Ribu Rupiah*.
3. Belanja Rutin dalam tahun 1998/1999 sebesar *54 Milyar 210 Juta 938 Ribu 598 Rupiah* naik sebesar *30 Milyar 962 Juta 684 Ribu 734 Rupiah* atau naik 133,18% dari rencana tahun 1997/1998 sebesar *23 Milyar 248 Juta 253 Ribu 864 Rupiah*.
4. Belanja Pembangunan dalam tahun 1998/1999 direncanakan sebesar *26 Milyar 529 Juta 340 Ribu Rupiah* terdapat penurunan sebesar *769 Juta 700 Ribu Rupiah* atau turun 2,82% dari 1997/1998 sebesar *27 Milyar 299 Juta 40 Ribu Rupiah*.
5. Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1998/1999 termasuk Urusan Kas dan Perhitungan direncanakan sebesar *91 Milyar 102 Juta 166 Ribu 762 Rupiah* terdapat kenaikan sebesar *11 Milyar 264 Juta 689 Ribu 998 Rupiah* atau sebesar 14,11% dari tahun 1997/1998 sebesar *79 Milyar 837 Juta 476 Ribu 764 Rupiah*.

VII. PENUTUP

Demikianlah keseluruhan uraian dan penjelasan mengenai Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1998/1999 yang dapat saya sampaikan pada Sidang Dewan Yang Terhormat ini.

Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya atas kearifan dan kebijaksanaan Dewan Yang Terhormat, dengan harapan semoga dalam waktu yang telah dijadwalkan dapatnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1998/1999.

Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.



Lamongan, 16 Maret 1998

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

R. MOHAMAD FARIED, SH.

**DAFTAR : REKAPITULASI RANCANGAN APBD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 1998/1999.**

No.	URAIAN	RENCANA TAHUN 1997/1998	RENCANA TAHUN 1998/1999
A. PENDAPATAN.			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.504.704.000,00	251.500.000,00
2.	Pendapatan Asli Daerah	4.982.950.000,00	5.247.650.000,00
	a. Pajak Daerah.	1.174.650.000,00	1.253.650.000,00
	b. Retribusi Daerah	3.471.600.000,00	3.598.950.000,00
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	117.500.000,00	130.000.000,00
	d. Penerimaan dari Dinas- Dinas.	71.500.000,00	72.250.000,00
	e. Penerimaan Lain-lain.	147.700.000,00	192.800.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.	6.572.511.164,00	7.219.145.498,00
	a. Bagi hasil Pajak	6.444.810.764,00	7.102.192.214,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	127.700.400,00	116.953.284,00
4.	Sumbangan dan Bantuan	36.187.128.700,00	68.021.983.100,00
	a. Pos Sumbangan.	14.968.970.700,00	45.205.448.100,00
	b. Pos Bantuan.	21.218.158.000,00	22.816.535.000,00
5.	Penerimaan Pembangunan	300.000.000,00	0,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	300.000.000,00	UP
	a. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		50.547.293.864,00	80.740.278.598,00

B. BELANJA

No.	URAIAN	RENCANA TAHUN 1997/1998	RENCANA TAHUN 1998/1999
	<u>RUTIN</u>	23.248.253.864,00	54.210.938.598,00
1.	Belanja Pegawai.	14.003.004.200,00	44.313.523.600,00
2.	Belanja Barang.	3.299.867.900,00	3.436.268.400,00
3.	Belanja Pemeliharaan	594.130.000,00	660.870.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	237.040.000,00	237.920.000,00
5.	Belanja Lain-lain.	2.705.325.000,00	3.047.217.000,00
6.	Angsuran Pinjaman	36.000.000,00	36.000.000,00
7.	Belanja Pensiun		
8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan.	1.312.848.000,00	1.321.130.000,00
9.	Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	1.058.204.000,00	1.132.204.000,00
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	1.834.764,00	25.805.598,00
	<u>PEMBANGUNAN</u>	27.299.040.000,00	26.529.340.000,00
1.	Sektor Industri.	50.000.000,00	46.500.000,00
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	801.043.000,00	904.300.000,00
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	164.000.000,00	132.000.000,00
4.	Sektor Tenaga Kerja.	0,00	0,00
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	2.180.333.340,00	1.267.670.000,00
6.	Sektor Transportasi.	5.129.519.160,00	4.354.677.000,00
7.	Sektor Pertambangan dan Energi.	56.500.000,00	60.000.000,00
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomu- nikasi Daerah.	105.000.000,00	160.000.000,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	7.851.936.000,00	9.788.628.000,00
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	823.685.000,00	536.400.000,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga.	3.597.108.000,00	3.304.572.000,00
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	7.500.000,00	390.153.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	1.817.296.000,00	1.381.100.000,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman.	798.952.000,00	1.495.180.000,00
15.	Sektor Agama.	94.000.000,00	47.500.000,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.	0,00	125.000.000,00
17.	Sektor Hukum.	10.000.000,00	18.000.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	3.752.167.500,00	2.447.660.000,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	45.000.000,00	60.000.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	15.000.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA :	50.547.293.864,00	80.740.278.598,00